

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)**

Nota Dinas

Nomor : 18890/Ses.1/07/2023

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Juni 2023
Tanggal : 18 Juli 2023

Sehubungan dengan masa penyampaian laporan bulanan untuk periode bulan Juni 2023 oleh setiap Unit Organisasi Eselon II yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pagu anggaran LKPP tahun 2023 sebesar Rp200.222.132.000 dan sampai dengan bulan Juni 2023 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp73.390.445.683 (36,65%).
2. Realisasi anggaran LKPP pada bulan Juni 2023 (parsial) sebesar Rp15.895.848.856, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan Mei 2023 sebesar Rp19.251.635.922 sehingga memiliki deviasi sebesar minus (-)Rp3.343.887.066 atau minus (-)17,37%.
3. Pada bulan Juni 2023, LKPP telah membuat kontrak/komitmen sebanyak 52 paket dengan total nilai kontrak yaitu sebesar Rp27.268.413.184 dimana terdapat 21 kontrak yang telah selesai dibayarkan sehingga masih terdapat 31 kontrak dengan nilai sisa sebesar Rp10.621.335.248.
4. Pada tahun 2023 pagu pengadaan LKPP sebesar Rp144.812.970.000 (72,33%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 26 Juni 2023, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp129.826.377.200 atau sebesar 89,65%. Masih terdapat Rp14.986.592.800 (10,35%) yang belum diumumkan melalui aplikasi SiRUP.
5. Pada bulan Juni 2023, Nilai IKPA LKPP bulan Juni 2023 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 93,39 dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan 13 Juni 2023 adalah sebesar 51,7 nilai tersebut termasuk kedalam kategori Kurang.
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, setiap pimpinan unit organisasi agar:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
 - b. Mencermati dan segera meng-update pengumuman RUP di SiRUP untuk unit organisasi yang penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaan;
 - c. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan komponen);
 - d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan
 - e. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Juni 2023.
7. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang secara lebih lengkap beserta rekomendasinya dapat dilihat pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Juni 2023 (sebagaimana terlampir).
8. Dalam hal membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa A. (0819-3209-6526) atau Sdri. Agita (0878-7839-6621). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Iwan Herniwan

Tembusan :
Plt. Sekretaris Utama



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

**LAPORAN
MONITORING &
EVALUASI KINERJA
UNIT ORGANISASI
JUNI 2023**

SUMMARY

CAPAIAN FISIK LEMBAGA



Sasaran Strategis

LKPP Mempunyai 2 Tujuan dengan 8 Indikator



Sasaran Kegiatan

LKPP Memiliki 35 Sasaran Kegiatan dengan 53



Rincian Output

LKPP Memiliki 69 Rincian Output

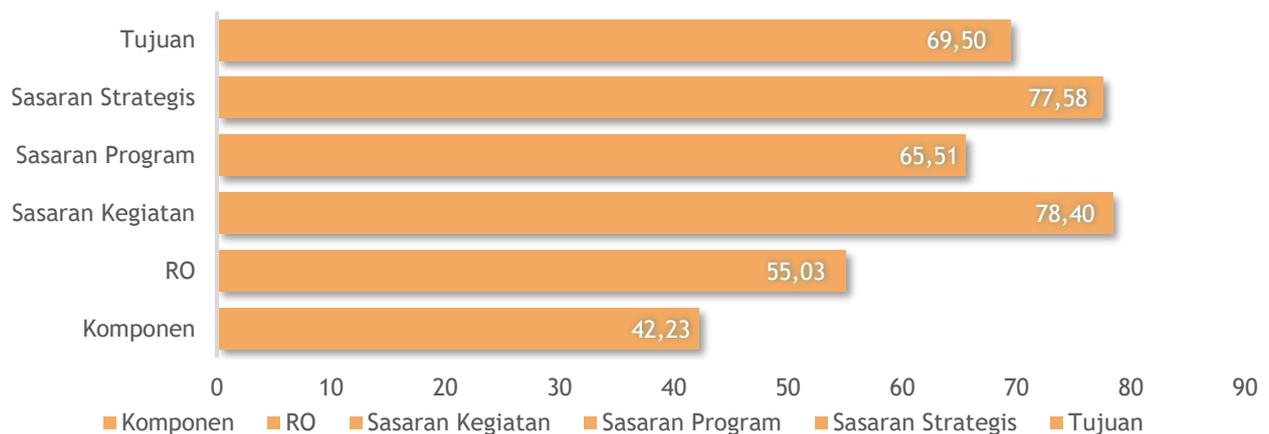


Komponen

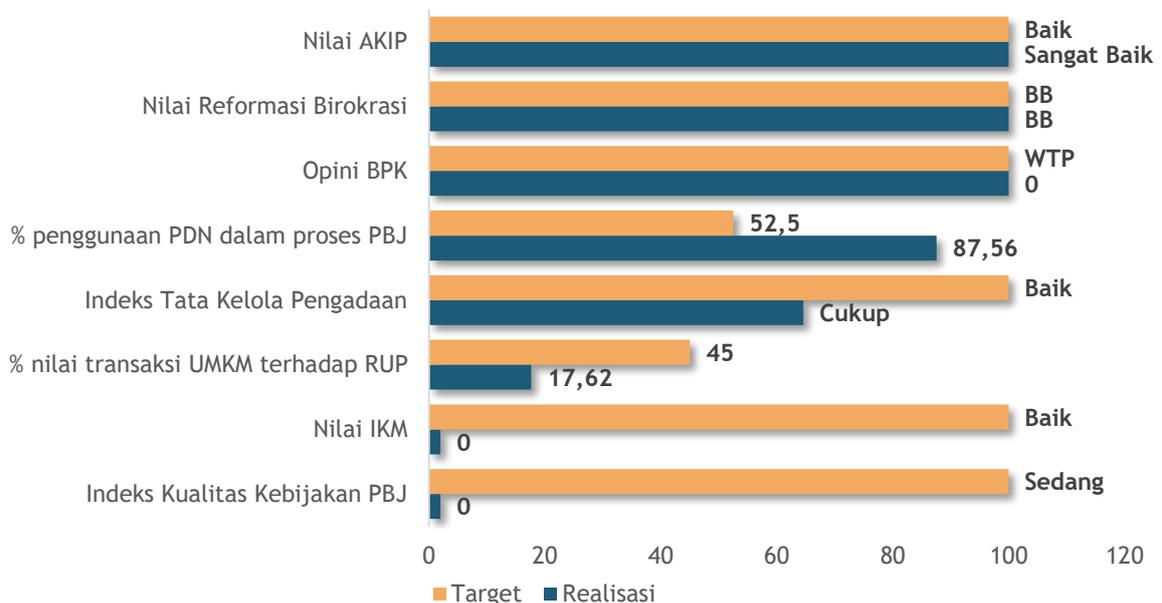
LKPP Memiliki 202 Komponen dari 69 Rincian



Capaian Fisik



Sasaran Strategis

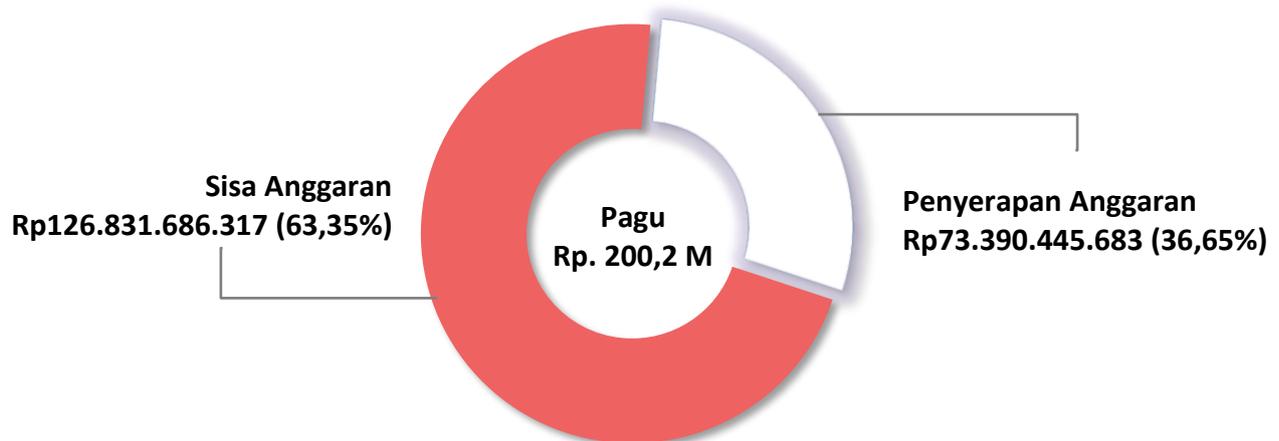


SUMMARY

PENYERAPAN ANGGARAN



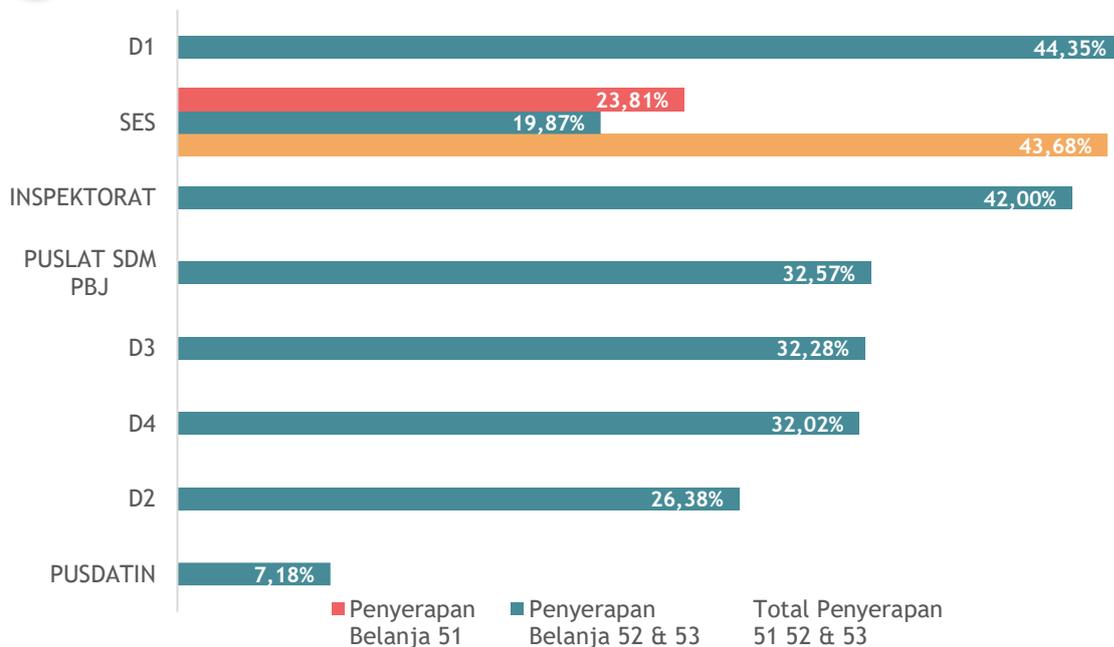
Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2023 berdasarkan aplikasi MonSAKTI



*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan tgl 30 Juni 2023



Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. I dan Unor Es. II Mandiri TA 2023 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

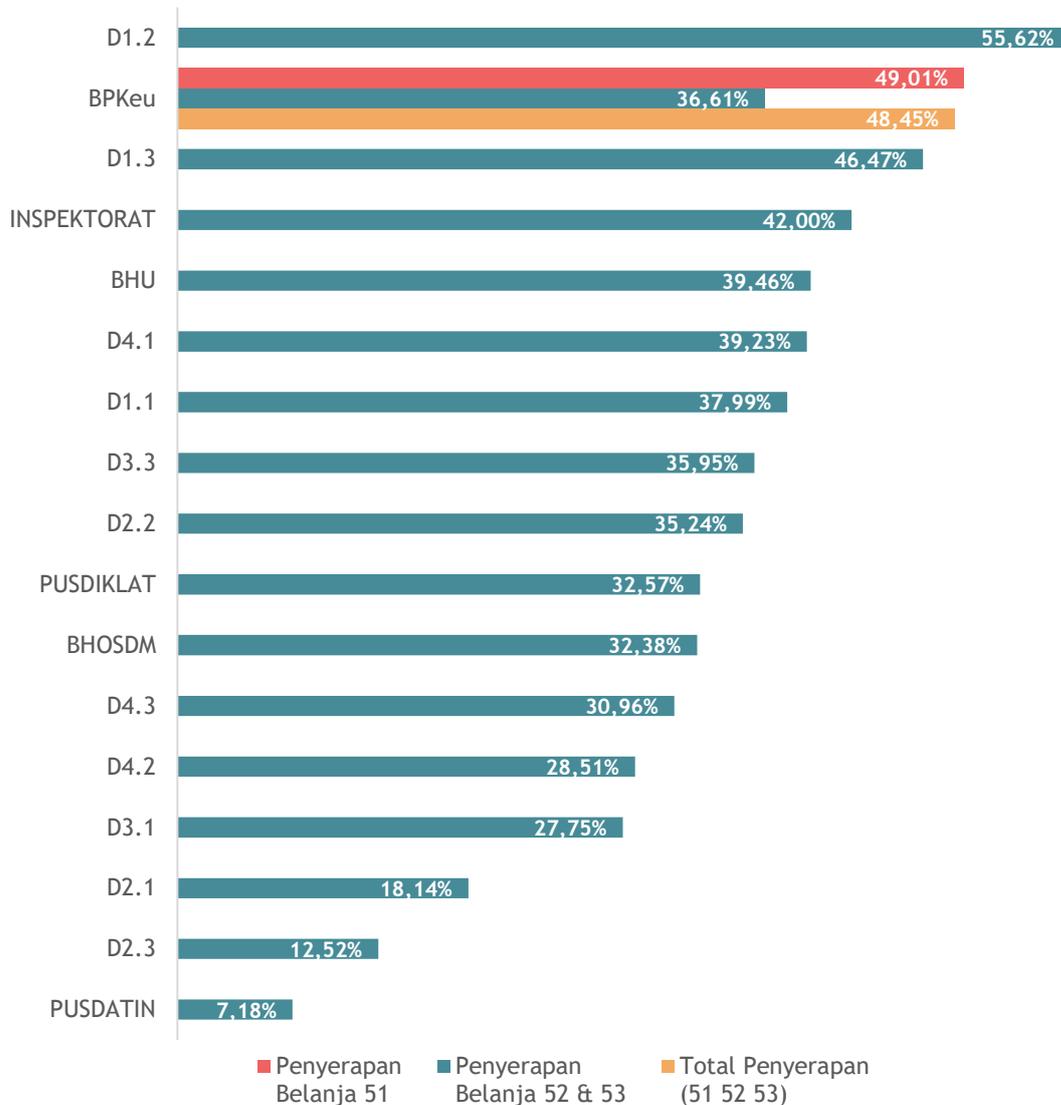


Berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar

terdapat pada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (44,35% - Rp2.988.669.058) dan terkecil terdapat pada Pusat Data dan Informasi (7,18% - Rp545.692.056).



Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. II



Berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar terdapat pada Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (55,62% - Rp923.280.120) dan terkecil terdapat pada Pusat Data dan Informasi (5,47% - Rp545.692.056).

PERBANDINGAN

RENCANA PENARIKAN DANA (RPD)

DENGAN REALISASI ANGGARAN

No.	Unit Organisasi	RPD Juni (Rp)	Realisasi Anggaran Juni (Rp)	Deviasi (Rp)	% Deviasi*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(4) – (3)	(5) / (3)
1	BHOSDM	653.636.986	464.221.448	-Rp189.415.538	-28,98%
2	BHU	3.358.094.000	3.276.003.784	-Rp82.090.216	-2,44%
3	BPKEU	354.365.092	218.326.876	-Rp136.038.216	-38,39%
4	BPKEU (Belanja Pegawai)	6.799.445.331	6.618.185.413	-Rp181.259.918	-2,67%
5	D1.1	139.976.610	497.604.483	Rp357.627.873	255,49%
6	D1.2	165.199.980	260.460.567	Rp95.260.587	57,66%
7	D1.3	135.749.750	229.276.891	Rp93.527.141	68,90%
8	D2.1 (Monev)	114.312.062	49.291.221	-Rp65.020.841	-56,88%
9	D2.2 (SPSE)	3.330.751.971	1.411.767.721	-Rp1.918.984.250	-57,61%
10	D2.3 (Katalog)	2.247.881.998	567.097.809	-Rp1.680.784.189	-74,77%
11	D3.1	74.507.415	650.331.753	Rp575.824.338	772,84%
12	D3.3	412.127.590	497.002.688	Rp84.875.098	20,59%
13	D4.1	90.647.511	71.567.529	-Rp19.079.982	-21,05%
14	D4.2	181.166.000	147.771.916	-Rp33.394.084	-18,43%
15	D4.3	228.098.538	137.256.227	-Rp90.842.311	-39,83%
16	INSPEKTORAT	54.853.994	102.034.316	Rp47.180.322	86,01%
17	PUSDATIN	591.319.000	-209.352.506	-Rp800.671.506	-135,40%
18	PUSLAT SDM PBJ	319.502.094	918.900.720	Rp599.398.626	187,60%
TOTAL LKPP		Rp19.251.635.922	15.907.748.856	-3.343.887.066	-17,37%

Catatan:

- * 1. Ambang batas deviasi antara RPD dengan realisasi adalah sebesar $\pm 5\%$ untuk nilai maksimum IKPA LKPP;
 - 2. Kinerja Unit Organisasi semakin baik bila Persentase Deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran mendekati 0%.
 - 3. Persentase Deviasi bernilai positif (+) jika Realisasi Anggaran lebih besar dari RPD
 - 4. Persentase Deviasi bernilai negatif (-) jika Realisasi Anggaran lebih kecil dari RPD
 - 5. Realisasi Anggaran (4) yang ditampilkan, merupakan penyerapan anggaran parsial bulan Juni tahun 2023
- Realisasi anggaran diluar ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$
■ Realisasi anggaran masih dalam ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$

DAFTAR ISI

Summary	2
Daftar Isi	6
Bab I Monitoring dan Evaluasi Lembaga.....	9
1.1 Anggaran	9
A. Pagu Anggaran	9
B. Penyerapan Anggaran.....	10
1.2 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.....	11
1.3 Komitmen/Kontrak	13
1.4 Pelaporan Eksternal	16
A. Nilai Kinerja Dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan	16
B. Pelaporan Kinerja Pada E-Monev Bappenas	18
Bab II Monitoring Dan Evaluasi Unit Organisasi	19
2.1 Biro Perencanaan Dan Keuangan (BPKEU)	19
A. Capaian Kinerja Fisik	19
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	20
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	20
D. Rekomendasi	20
2.2 Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM).....	21
A. Capaian Kinerja Fisik	21
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	22
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	22
D. Rekomendasi	23
2.3 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU).....	23
A. Capaian Kinerja Fisik	23
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	24
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	25
D. Rekomendasi	25
2.4 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1).....	26
A. Capaian Kinerja Fisik	26
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	27
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	27
D. Rekomendasi	27
2.5 Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2)	28
A. Capaian Kinerja Fisik	28

B. Capaian Kinerja Anggaran.....	29
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	29
D. Rekomendasi	29
2.6 Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3).....	30
A. Capaian Kinerja Fisik	30
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	31
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	31
D. Rekomendasi	31
2.7 Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) .	32
A. Capaian Kinerja Fisik	32
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	33
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	33
D. Rekomendasi	34
2.8 Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2)	35
A. Capaian Kinerja Fisik	35
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	36
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	36
D. Rekomendasi	38
2.9 Direktorat Sistem Pasar Digital Pengadaan (D2.3)	39
A. Capaian Kinerja Fisik	39
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	40
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	40
D. Rekomendasi	41
2.10 Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1).....	42
A. Capaian Kinerja Fisik	42
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	43
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	43
D. Rekomendasi	44
2.11 Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3)	45
A. Capaian Kinerja Fisik	45
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	46
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	46
D. Rekomendasi	46
2.12 Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1).....	47
A. Capaian Kinerja Fisik	47

B. Capaian Kinerja Anggaran.....	48
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	48
D. Rekomendasi	48
2.13 Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2)	49
A. Capaian Kinerja Fisik	49
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	50
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	50
D. Rekomendasi	51
2.14 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3)	53
A. Capaian Kinerja Fisik	53
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	54
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	54
D. Rekomendasi	54
2.15 Inspektorat.....	55
A. Capaian Kinerja Fisik	55
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	56
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	56
D. Rekomendasi	57
2.16 Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa	57
A. Capaian Kinerja Fisik	57
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	58
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	58
D. Rekomendasi	59
2.17 Pusat Data dan Informasi.....	60
A. Capaian Kinerja Fisik	60
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	60
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	61
D. Rekomendasi	61
Bab III Kesimpulan.....	63

BAB I MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

1.1 ANGGARAN

A. Pagu Anggaran

Pagu LKPP sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar **Rp200.222.132.000**. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	55.409.162.000	27.67%
52 Belanja Barang	120.204.065.000	60.04%
53 Belanja Modal	24.608.905.000	12.29%
TOTAL	200.222.132.000	100.00%

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi LKPP adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
SETTAMA	55.409.162.000	52.348.119.000	6.290.696.000	114.047.977.000
BHOSDM	-	5.728.000.000	-	5.728.000.000
BHU	-	44.040.119.000	6.270.696.000	50.310.815.000
BPKeu	-	2.580.000.000	20.000.000	2.600.000.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	55.409.162.000	-	-	55.409.162.000
Kedepatian 1 (D1)	-	6.738.500.000	-	6.738.500.000
D1.1	-	3.475.000.000	-	3.475.000.000
D1.2	-	1.660.000.000	-	1.660.000.000
D1.3	-	1.603.500.000	-	1.603.500.000
Kedepatian 2 (D2)	-	38.844.288.000	15.860.689.000	54.704.977.000
D2.1	-	3.180.080.000	390.000.000	3.570.080.000
D2.2	-	24.208.105.000	8.282.352.000	32.490.457.000
D2.3	-	11.456.103.000	7.188.337.000	18.644.440.000
Kedepatian 3 (D3)	-	7.396.418.000	-	7.396.418.000
D3.1	-	3.309.918.000	-	3.309.918.000
D3.3	-	4.086.500.000	-	4.086.500.000
Kedepatian 4 (D4)	-	4.780.000.000	-	4.780.000.000
D4.1	-	1.150.000.000	-	1.150.000.000
D4.2	-	1.810.000.000	-	1.810.000.000
D4.3	-	1.820.000.000	-	1.820.000.000
INSPEKTORAT	-	850.000.000	-	850.000.000
PUSDIKLAT	-	3.474.880.000	625.120.000	4.100.000.000
PUSDATIN	-	5.771.860.000	1.832.400.000	7.604.260.000
TOTAL	55.409.162.000	120.204.065.000	24.608.905.000	200.222.132.000

B. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar **Rp73.390.445.683** atau sebesar **36,65%**. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	55.409.162.000	27.153.669.457	49,01%	28.255.492.543
52 Belanja Barang	120.204.065.000	39.026.333.029	32,47%	81.177.731.971
53 Belanja Modal	24.608.905.000	7.210.443.197	29,30%	17.398.461.803
TOTAL	200.222.132.000	73.390.445.683	36,65%	126.831.686.317

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
Belanja Pegawai	Rp55.409.162.000	Rp27.153.669.457	49,01%	Rp28.255.492.543
D1	6.738.500.000	2.988.669.058	44,35%	3.749.830.942
INSPEKTORAT	Rp850.000.000	Rp357.033.531	42,00%	Rp492.966.469
SES	58.638.815.000	22.658.625.239	38,64%	35.980.189.761
PUSLAT SDM PBJ	Rp4.100.000.000	Rp1.335.189.251	32,57%	Rp2.764.810.749
D3	7.396.418.000	2.387.738.556	32,28%	5.008.679.444
D4	4.780.000.000	1.530.777.500	32,02%	3.249.222.500
D2	54.704.977.000	14.433.051.035	26,38%	40.271.925.965
PUSDATIN	Rp7.604.260.000	Rp545.692.056	7,18%	Rp7.058.567.944
TOTAL	200.222.132.000	73.390.445.683	36,65%	126.831.686.317

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
D1.2	1,660,000,000	923,280,120	55.62%	736,719,880
Belanja Pegawai	55,409,162,000	27,153,669,457	49.01%	28,255,492,543

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
D1.3	1,603,500,000	745,115,531	46.47%	858,384,469
INSPEKTORAT	850,000,000	357,033,531	42.00%	492,966,469
BHU	50,310,815,000	19,851,713,458	39.46%	30,459,101,542
D4.1	1,150,000,000	451,158,705	39.23%	698,841,295
D1.1	3,475,000,000	1,320,273,407	37.99%	2,154,726,593
BPKeu	2,600,000,000	951,981,616	36.61%	1,648,018,384
D3.3	4,086,500,000	1,469,159,689	35.95%	2,617,340,311
D2.2	32,490,457,000	11,450,384,800	35.24%	21,040,072,200
PUSLAT SDM PBJ	4,100,000,000	1,335,189,251	32.57%	2,764,810,749
BHOSDM	5,728,000,000	1,854,930,165	32.38%	3,873,069,835
D4.3	1,820,000,000	563,537,890	30.96%	1,256,462,110
D4.2	1,810,000,000	516,080,905	28.51%	1,293,919,095
D3.1	3,309,918,000	918,578,867	27.75%	2,391,339,133
D2.1	3,570,080,000	647,728,195	18.14%	2,922,351,805
D2.3	18,644,440,000	2,334,938,040	12.52%	16,309,501,960
PUSDATIN	7,604,260,000	545,692,056	7.18%	7,058,567,944
TOTAL	200.222.132.000	73.390.445.683	36,65%	126.831.686.317

1.2 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Berdasarkan revisi anggaran ke-11 pagu pengadaan LKPP adalah sebesar Rp144.812.970.000 (72.33%) dari pagu total LKPP. Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 26 Juni 2023, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp129.826.377.200 atau sebesar 89,65% yang terdiri dari:

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Jasa Lainnya	446	55.983.947.000	38,66%
Jasa Konsultansi	285	26.217.990.200	18,10%
Barang	56	21.797.502.000	15,05%
Pekerjaan Konstruksi	2	1.101.062.000	0,76%
Swakelola	317	24.725.876.000	17,07%
TOTAL	1106	129.826.377.200	89,65%

Metode Pemilihan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Pengadaan Langsung	499	34.193.514.200	23,61%
e-Purchasing	14	22.430.677.000	15,49%
Seleksi	184	21.850.253.000	15,09%
Tender	26	13.426.891.000	9,27%
PenunjukanLangsung	15	10.982.083.000	7,58%
Dikecualikan	51	2.217.083.000	1,53%
Swakelola	317	24.725.876.000	17,07%
TOTAL	1106	129.826.377.200	89,65%

Adapun progres penayangan paket pengadaan barang/jasa per Unit Organisasi Eselon II adalah sebagai berikut (dalam juta rupiah):

Unit Organisasi Eselon II	Pagu Pengadaan	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total Paket		Persentase Penayangan
		Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	
BHOSDM	5.728,00	80	3.146,09	33	1.834,45	0	0,00	113	4.980,54	86,95%
BHU	50.310,82	110	36.347,69	41	4.103,00	0	0,00	151	40.450,68	80,40%
BPKeu	2.600,00	0	0,00	10	1.232,38	17	1.367,62	27	2.600,00	100,00%
D1.1	3.475,00	2	300,00	47	2.917,40	7	417,20	56	3.634,60	104,59%
D1.2	1.660,00	0	0,00	10	337,74	32	1.322,27	42	1.660,00	100,00%
D1.3	1.603,50	0	0,00	12	1.274,70	7	328,80	19	1.603,50	100,00%
D2.1	3.570,08	52	2.816,78	8	430,14	0	0,00	60	3.246,92	90,95%
D2.2	32.490,46	82	27.265,82	30	1.689,33	0	0,00	112	28.955,16	89,12%
D2.3	18.644,44	45	13.886,17	26	4.796,05	0	0,00	71	18.682,22	100,20%
D3.1	3.309,92	0	0,00	11	947,96	47	1.845,07	58	2.793,04	84,38%
D3.3	4.086,50	0	0,00	17	1.452,47	75	2.634,03	92	4.086,50	100,00%
D4.1	1.150,00	6	298,52	8	173,29	18	674,59	32	1.146,40	99,69%

Unit Organisasi Eselon II	Pagu Pengadaan	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total Paket		Persentase Penayangan
		Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	
D4.2	1.810,00	0	0,00	6	473,70	49	1.336,30	55	1.810,00	100,00%
D4.3	1.820,00	12	175,10	6	625,73	37	1.083,19	55	1.884,02	103,52%
INSPEKTORAT	850,00	12	446,74	17	403,26	0	0,00	29	850,00	100,00%
PUSDATIN	7.604,26	40	7.045,71	15	297,11	0	0,00	55	7.342,82	96,56%
PUSLAT SDM PBJ	4.100,00	1	547,23	20	1.737,18	58	1.815,60	79	4.100,00	100,00%
TOTAL	144.812,97	442	92.275,84	317	24.725,88	347	12.824,66	1106	129.826,38	89,65%

 Persentase Penayangan Tidak 100%

Rata-rata persentase penayangan sebesar 89,65% dikarenakan masih terdapat unit organisasi yang melakukan proses revisi menayangkan paket pengadaan. Selisih pagu pengadaan dengan penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar Rp14.986.592.800.

1.3 KOMITMEN/KONTRAK

Berdasarkan aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan sampai dengan 30 Juni 2023, LKPP memiliki 52 paket komitmen/kontrak yang didaftarkan. Adapun nilai total seluruh paket yang telah didaftarkan adalah **Rp27.268.413.184** dengan jumlah nilai kontrak yang telah direalisasi sebesar **Rp16.647.077.936** dan nilai sisa kontrak sebesar **Rp10.621.335.248**.

Berikut terlampir daftar 52 paket komitmen/kontrak yang masih terdapat sisa kontrak yang belum realisasi, yaitu:

No	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
1	Sewa Collocation Data Center DCI	2.597.400.000	1.623.375.000	974.025.000
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengembang Aplikasi Pendukung SPSE Terpusat	1.684.730.250	962.703.000	722.027.250
3	Pengadaan Sewa Communication Center (Call Center)	72.992.490	72.992.490	-
4	Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengembang Aplikasi SPSE Terpusat	1.392.772.500	795.870.000	596.902.500
5	Sewa Internet Utama Operasional Direktorat PSPSE	888.000.000	370.000.000	518.000.000
6	Sewa Internet Data Center DCI Secondary	189.500.000	84.785.750	104.714.250

No	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
7	Sewa Internet Zoom Operasional Direktorat PSPSE	114.000.000	47.500.000	66.500.000
8	Sewa Internet Data Center DCI Primary	928.800.000	387.000.000	541.800.000
9	Jasa Konsultansi Perorangan IT Software Architect	395.472.000	225.984.000	169.488.000
10	Jasa Konsultansi Perorangan Software Engineer	285.000.000	180.000.000	105.000.000
11	Jasa Konsultansi Perorangan System Analyst	199.500.000	119.700.000	79.800.000
12	Jasa Konsultansi Perorangan Senior Infrastructure Engineer	220.500.000	132.300.000	88.200.000
13	Jasa Konsultansi Perorangan Pengaman Enkripsi Data	161.000.000	84.000.000	77.000.000
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala LKPP (BHSIU)	601.900.000	601.900.000	-
15	Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Eselon II	1.685.236.800	-	1.685.236.800
16	Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengembang Aplikasi SPSE Terpusat (JAVA)	1.636.861.500	909.367.500	727.494.000
17	Pengadaan Lisensi Perangkat Security	2.025.000.000	2.025.000.000	-
18	Paket Pekerjaan Fullboard Pembahasan Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dan Penyusunan Revisi Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	174.768.000	174.768.000	-
19	Sewa Communication Center (Call Center) Tahun 2023	818.438.298	297.613.920	520.824.378
20	Fullboard Meeting Kegiatan Konsinyering Monitoring Keamanan Informasi LPSE	86.470.000	86.470.000	-
21	Pengadaan kendaraan dinas pejabat Eselon I (BHSIU)	3.598.100.000	3.598.100.000	-
22	Pengadaan Lisensi Nutanix	1.625.000.000	1.625.000.000	-
23	Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Angkut (Gondola) di Gedung LKPP	135.000.000	20.250.000	114.750.000
24	Kegiatan Asesmen Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	251.800.000	251.800.000	-
25	Jasa Lainnya Pengelola Media Sosial Kepala LKPP	155.000.000	62.000.000	93.000.000
26	Fullday Meeting Pembahasan Penyusunan Dokumen Rencana Teknis dengan Telkom, Diskusi Koordinasi Keamanan Informasi untuk Tata Kelola Fungsi LPSE dan Diskusi	69.713.000	69.713.000	-

No	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
	Pengembangan Aplikasi SPSE dan Sistem Pendukungnya melalui Koordinasi Integrasi OSS			
27	Paket Fullboard Meeting Menghadiri rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Serta Penyusunan Rencana Revitalisasi Gedung LKPP TA 2023	91.572.000	91.572.000	-
28	Paket Pekerjaan Fullday Meeting Pembahasan Substansi Pengaturan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dengan Panitia Antarkementerian dan/atau Non Kementerian (PAK)	56.290.000	56.290.000	-
29	Layanan Jasa Pengasuransian Barang Milik Negara pada LKPP	284.655.026	284.655.026	-
30	Paket Pekerjaan Fullday Meeting Pembahasan Substansi Pengaturan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dengan Panitia Antarkementerian dan/atau Non Kementerian (PAK)	56.290.000	56.290.000	-
31	Pengadaan Sewa Air Conditioner di Gedung LKPP	117.049.500	-	117.049.500
32	Pembuatan Video Animasi Tentang Panduan Model Kematangan UKPBJ (MK-UKPBJ)	176.790.000	-	176.790.000
33	Pemeliharaan Genset(Bahan Bakar Minyak)	175.796.250	175.796.250	-
34	Konsultan Pendampingan ISO 9001:2015	51.060.000	-	51.060.000
35	Pengadaan AC Standing dan AC Portable dengan instalasinya	129.500.000	129.500.000	-
36	Sewa kendaraan operasional Eselon II	212.000.000	-	212.000.000
37	Sewa Metro-E	520.000.000	65.000.000	455.000.000
38	Pengadaan Seminar Kits Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional UKPBJ K/L/PD Tahun Anggaran 2023	164.000.000	164.000.000	-
39	Pengadaan Solid State Driver (SSD)	1.049.000.000	-	1.049.000.000
40	Pengadaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Fullday Meeting)Kegiatan Rapat Koordinasi UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah mencapai Kematangan Proaktif (Level 3)	233.450.000	233.450.000	-
41	Pengadaan Alat Modal Kantor Laptop Olah Data	389.310.000	389.310.000	-
42	Pembuatan Bahan Pembelajaran Multimedia Interaktif Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa pada	465.145.500	-	465.145.500

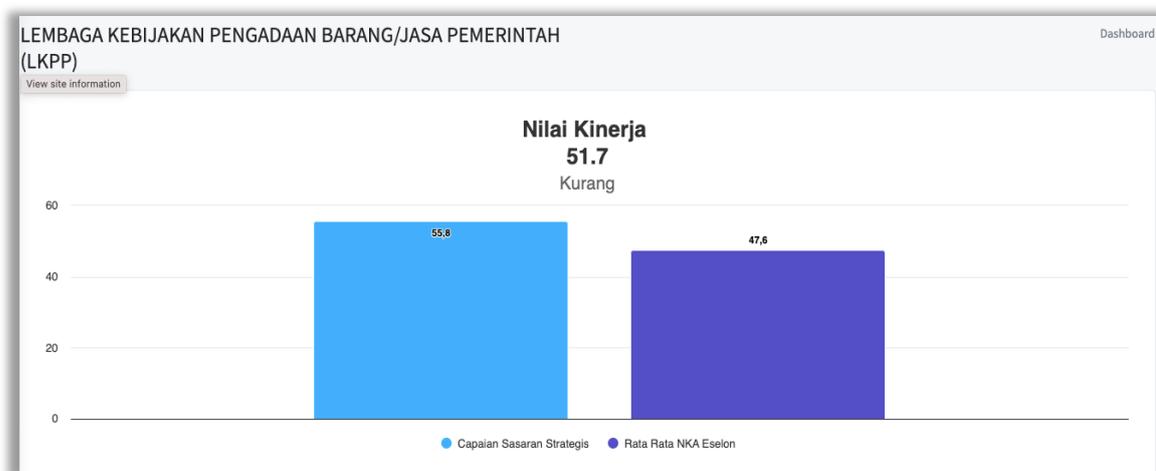
No	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
	Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP Tahun Anggaran 2023			
43	Paket Pekerjaan Fullday Meeting Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Batch 4	58.022.000	58.022.000	-
44	Jasa Penyimpanan Arsip Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023	84.000.000	84.000.000	-
45	Pengadaan langsung pekerjaan pemeliharaan AC di Gedung LKPP Tahun 2023	68.820.000	-	68.820.000
46	Pengadaan Paket Meeting Dalam Kota (Fullday Meeting) Kegiatan Bimbingan Teknis dan Mentoring 100 UKPBJ Target Pembinaan Tahun 2023 Pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	316.480.000	-	316.480.000
47	Pemeliharaan Data Center TA 2023	155.400.000	-	155.400.000
48	Pengadaan Air Conditioning (AC) standing dengan instalasinya di ruangan sekretaris kepala LKPP, Direktur pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, dan Kepala Pusat Data dan Informasi	135.137.150	-	135.137.150
49	Paket Pekerjaan Fullday Meeting Dalam Rangka Pemaparan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	51.000.000	51.000.000	-
50	Pengadaan ATK di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	56.891.000	-	56.891.000
51	Konsultan Readiness to Change Level 3	79.999.920	-	79.999.920
52	Fullday dan Fullboard Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	97.800.000	-	97.800.000
TOTAL		27.268.413.184	16.647.077.936	10.621.335.248

1.4 PELAPORAN EKSTERNAL

A. Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan

Aplikasi SMART DJA adalah sebuah aplikasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L. Aplikasi ini menampilkan hasil nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian/Lembaga dari level Satker, Unit Eselon I hingga level Kementerian/Lembaga. Nilai EKA ini akan digunakan sebagai

salah satu indikator pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.



Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi Smart DJA Kementerian Keuangan

Nilai kinerja LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan 13 Juli 2023 adalah sebesar 51,7 yang termasuk kedalam kategori Kurang, dengan rincian NKA Eselon I dan NKA Satuan Kerja sebagai berikut:

NKA Eselon I

Monitoring / NKA Eselon I

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Eselon I	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	47,60	38,28	39,65	98,11	48,11	20,00	100	45,94

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 1. 2 Tampilan Aplikasi Smart DJA NKA Eselon I

NKA Satuan Kerja

Monitoring / NKA Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	070968	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	45,94	39,65	98,11	10,56	7,48	68,69

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

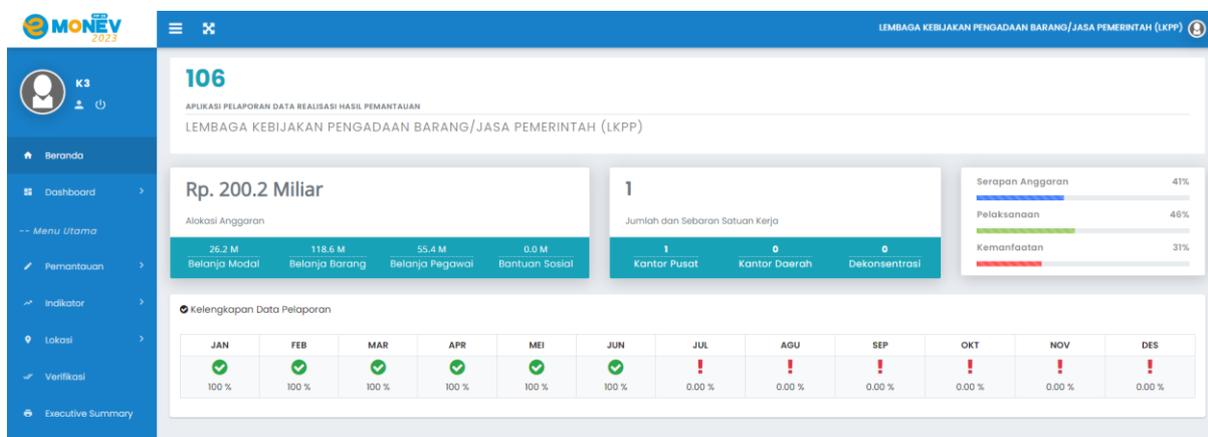
Gambar 1. 3 Tampilan Aplikasi Smart DJA NKA Satuan Kerja

B. Pelaporan Kinerja pada E-Monev Bappenas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev bappenas dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut: https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-e-Monev_2021_v1_19032021.pdf.

LKPP telah melaporkan kinerja pada e-monev Bappenas untuk periode kinerja Januari s.d Juni 2023, dengan tampilan aplikasi e-monev seperti dibawah ini.



Gambar 1. 4 Tampilan Pengisian Aplikasi E-Monev Bappenas

BAB II MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1	01-Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan pengelolaan anggaran	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Sama dengan rata-rata nasional	Nilai IKPA = 93.39
2.	02-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP aspek perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Progres: Telah dilakukan Pra Evaluasi oleh KemenPAN RB

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 50%
2.	955-Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	8 Dokumen
3.	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5 Dokumen	1 Dokumen
4.	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	Progres: 61%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Juni 2023 adalah 40,81%.

3. Komponen	
-------------	--

Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Juni 2023 adalah 53,78%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp 58.009.162.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	55.409.162.000	27.153.669.457	49.01 %	28.255.492.543
52 Belanja Barang	2.580.000.000	951.981.616	36.9 %	1.628.018.384
53 Belanja Modal	20.000.000	-	-	20.000.000
Total	58.009.162.000	28.105.651.073	48.45 %	29.903.510.927

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BPKeu di bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan nilai IKPA pada bulan Juni yaitu sebesar 93,39 dibandingkan dengan bulan lalu yaitu sebesar 90,44.
2. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran BPKeu (parsial) sebesar Rp6.836.512.289. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp7.153.810.423 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp317.298.134 atau -41,06%.
3. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 100% ditayangkan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Guna meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga, agar memperhatikan terhadap delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Peyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
2. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan harus tepat waktu.
4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 5 indikator sasaran kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1	01-Terselenggaranya sistem manajemen ASN yang mendukung profesionalitas SDM	01-Indeks profesionalitas ASN LKPP	Predikat: Sangat Tinggi	Progres: 73.50 %
		02-Indeks sistem merit	Predikat: Sangat Baik	Progres: 58.75 %
2.	02-Meningkatnya nilai reformasi birokrasi area penguatan perundang-undangan	01-Nilai reformasi birokrasi LKPP area penguatan peraturan perundang-undangan	Predikat: Sangat baik	Progres: 55%
3.	03-Terpenuhinya kualitas penerapan reformasi birokrasi	01-Jumlah rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	1 Rekomendasi	Progres: 47%
		02-Laporan evaluasi organisasi dan tata laksana	1 Laporan	Progres: 68%

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1	957-Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 48.08%
2.	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2 Layanan	Progres: 68%
3.	969-Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 51.11 %
4.	954-Layanan Manajemen SDM	357 Orang	206 Orang
5.	961-Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	Progres: 47%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Juni 2023 adalah 54,38%.

3. Komponen

Tahun 2023, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Juni 2023 adalah 53,11%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran BHOSDM TA 2023 adalah sebesar Rp 5.728.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	5.728.000.000	1.854.930.165	32.38 %	3.873.069.835
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	5.728.000.000	1.854.930.165	32.38 %	3.873.069.835

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran BHOSDM (parsial) sebesar Rp464.221.448. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp653.636.986 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp189.415.538 atau -28,98%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHOSDM adalah 89,95% yang ditayangkan. hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat 3 paket pengadaan barang/jasa yang status nya belum dimulai, yaitu:
 - a. Jasa Konsultan Penyusunan SOP LKPP 2023, akan dilaksanakan pada bulan Agustus
 - b. Konsultan Pelatihan Building Trust and Team Collaboration, Penyedia tidak memenuhi klasifikasi pengadaan jasa konsultan
 - c. Pengadaan Jasa Konsultan asesmen CASN dibatalkan karena akan fokus untuk rekrutmen P3K.

4. Pada SK terselenggaranya sistem manajemen ASN yang mendukung profesionalitas SDM, masih banyak pegawai yang belum melakukan *self report* terhadap pengembangan kompetensi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
5. Melakukan monitoring secara berkala saat pelaksanaan selesai, melakukan list dan *follow up* peserta yang belum mengisi *self report*.

2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 8 indikator Rincian Output, dan 18 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1	01-Terwujudnya pelayanan tata kelola organisasi melalui pelaksanaan pengelolaan kearsipan	01-Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Sangat Baik	Progres: 50%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
2.	02-Terpenuhinya kualitas penerapan pelayanan publik	01-Rekomendasi atas hasil evaluasi IKM	1 Rekomendasi	Progres: 49.98 %
		02-Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks: Informatif	Progres: 46.91 %
3.	03-Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan pemenuhan sarana, prasarana dan kesekretariatan	01-Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I	Indeks: Cukup Puas	Progres: 25 %

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1	956-Layanan BMN	1 Layanan	Progres: 50%
2.	958-Layanan Hubungan Masyarakat	4 Layanan	Progres: 52,44%
3.	959-Layanan Protokoler	1 Layanan	Progres: 50%
4.	962-Layanan Umum	1 Layanan	Progres: 50%
5.	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 50%
6.	951-Layanan Sarana Internal	87 Unit	Progres: 81%
7.	971-Layanan Prasarana Internal	1 Unit	Progres: 25%
8.	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	Progres: 50%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan Juni 2023 adalah 51,06%.

3. Komponen

Tahun 2023 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum memiliki 18 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Juni 2023 adalah 54,54%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran BHU TA 2023 adalah sebesar 50.310.815.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
52 Belanja Barang	49.811.979.000	15.368.529.561	30,85%	34.443.449.439
53 Belanja Modal	8.103.096.000	4.483.183.897	55,33%	3.619.912.103
Total	57.915.075.000	19.851.713.458	39,46%	38.063.361.542

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHU di bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran BHU (parsial) sebesar Rp3.276.003.784. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp3.358.094.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp82.090.216 atau -2,44%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHU adalah 80,40% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Pada RO Layanan Sarana Internal, dokumen administrasi pada paket pengadaan kendaraan yang diterima LKPP belum lengkap, sehingga BAST belum dilakukan.
4. Informasi permohonan peliputan sering kali diterima beberapa menit sebelum pelaksanaan, disisi lain humas sudah pernah mensosialisasikan SOP permohonan peliputan kepada seluruh Unor Es II. Peliputan kegiatan bulan Juni diantaranya Konsolidasi Alkes, Kit Stunting 2023; dan Kunjungan Kerja Kab. Jepara.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.

3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
5. Membangun komunikasi yang intensif kepada penyedia untuk mempercepat proses penerbitan BPKB agar BAST dapat segera diterbitkan.

2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 1 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
1.	01-Tersedianya rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas	01-Jumlah rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas	6 Rumusan	1 Rumusan

2. Rincian Output				
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni	
1	111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan	
2.	111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	4 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 35,19%	

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.1 pada bulan Juni 2023 adalah 40,10%.

3. Komponen				
-------------	--	--	--	--

Tahun 2023, D1.1 memiliki 6 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Juni 2023 adalah 48,37%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D1.1 TA 2023 adalah sebesar Rp3.475.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	3.475.000.000	1.320.273.407	37.99%	2.154.726.593
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	3.475.000.000	1.320.273.407	37.99%	2.154.726.593

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran D1.1 (parsial) sebesar Rp497.604.483 Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp139.976.610 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp357.627.873 atau 255,49%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.1 adalah 104,59%. Hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya, selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
1.	02-Tersedianya strategi/kebijakan pengadaan khusus yang berkualitas	01-Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD	1 Dokumen Kebijakan	Progres: 40%
		02-Dokumen kebijakan pengadaan KPBU	1 Dokumen Kebijakan	Progres: 55%
		03-Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di desa	1 Dokumen Kebijakan	Progres: 55%
2.	03-Terselenggaranya pendampingan/pemberian pendapat kebijakan pengadaan khusus	01-Dokumen pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha. BLU/BLUD Badan Hukum Publik. KPBU dan Desa	3 Dokumen	Progres: 45%

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
1	124-Model Dokumen PBJ Khusus	3 NSPK	Progres: 50%
2.	123-Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus	10 Lembaga	Progres: 55%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.2 pada bulan Juni 2023 adalah 52,50%.

3. Komponen	

Tahun 2023, D1.2 memiliki 6 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Juni 2023 adalah 52,55%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D1.2 TA 2023 adalah sebesar Rp1.660.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	1.660.000.000	923.280.120	55.62%	736.719.880
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	1.660.000.000	923.280.120	55.62%	736.719.880

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran D1.2 (parsial) sebesar Rp260.460.567. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp165.199.980 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp95.260.587 atau 57,66%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.2 adalah 100%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3) memiliki 2 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
1.	04-Terpenuhinya kebijakan PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	Jumlah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kerangka kerjasama internasional	1 Dokumen Kebijakan	Progres: 23%
2.	01-Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam PBJ	01-Peningkatan jumlah pelaku usaha UMK yang terlibat dalam PBJP	252 Pelaku Usaha	Progres: 19%

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
1.	131-Hasil Kesepakatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kerangka Kerjasama Perdagangan Internasional	3 Kesepakatan	Progres: 39%
2.	131-Badan Usaha yang Difasilitasi dalam Peluang Akses PBJ Internasional	500 Badan Usaha	Progres: 35%
3.	131-NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 NSPK	Progres: 35%
4.	132-Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	1240 UMKM	808 UMKM

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.3 pada bulan Juni 2023 adalah 36,50%.

3. Komponen	
-------------	--

Tahun 2023, D1.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Juni 2023 adalah 32,67%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D1.3 TA 2023 adalah sebesar Rp1.603.500.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	1.603.500.000	745.115.531	46.47%	858.384.469
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	1.603.500.000	745.115.531	46.47%	858.384.469

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran D1.3 (parsial) sebesar Rp229.276.891. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp135.749.750 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp93.527.141 atau 68,90%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 100% ditayangkan.
3. Pada RO NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam PBJP, masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi, dikarenakan pengadaan berkelanjutan untuk konstruksi belum banyak *best practice* dan tergolong baru pada pengadaan di Indonesia.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dengan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. Menyusun strategi agar kegiatan yang mendukung RO NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam PBJP dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.

2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) memiliki 5 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	01-Meningkatnya kualitas sistem informasi perencanaan pengadaan yang mendorong produk dalam negeri dan meningkatnya partisipasi UMK	01-Persentase paket pengadaan yang dicadangkan bagi UMK dalam Rencana Umum Pengadaan	50 Persen	35,9 Persen
		02-Persentase penggunaan produk dalam negeri pada paket pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan	52,5 Persen	61,4 Persen
2.	02-Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan monev pengadaan	01-Persentase realisasi penayangan Rencana Umum Pengadaan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	75 Persen	98 Persen
		02-Capaian indeks kinerja pengadaan barang/jasa	Indeks: 35	Indeks 41,9
3.	03-Terwujudnya peningkatan efektivitas proses pengadaan melalui sistem informasi yang terintegrasi	01-Jumlah pengembangan, integrasi, dan implementasi sistem perencanaan dan monitoring-evaluasi pengadaan	6 Segmen	5 Segmen

 Target telah tercapai

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	211-Dokumen Rencana Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pengadaan	1 Dokumen	Progres: 37%

No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
2.	211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	2 Laporan	Progres: 21,38 %
3.	211-Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 38,75%
4.	212-Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 41%

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D2.1 pada bulan Juni 2023 adalah 34,53%.

3. Komponen

Tahun 2023, D2.1 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Juni 2023 adalah 40,26%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D2.1 TA 2023 adalah sebesar Rp3.570.080.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.180.080.000	647.728.195	20,37%	2.532.351.805
53 Belanja Modal	390.000.000	-	0%	390.000.000
Total	3.570.080.000	647.728.195	18,14%	2.922.351.805

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi penyerapan anggaran D2.1 (parsial) adalah sebesar Rp49.291.221 dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp114.312.062 sehingga memiliki deviasi sebesar minus (-)Rp65.020.841 atau minus (-)56,88%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.1 yang telah ditayangkan adalah 90,95%, hal tersebut dikarenakan rencana pengadaan yang belum seluruhnya *diinput* pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Pada Indikator Sasaran Program Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa, realisasi sampai dengan bulan Juni 2023 adalah sebesar 87,56 persen, realisasi tersebut sudah jauh melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 52,5 persen.

4. Terdapat 3 indikator Sasaran Kegiatan yang sampai dengan bulan Juni 2023 realisasinya telah melebihi target, antara lain:
 - a. Persentase penggunaan produk dalam negeri pada paket pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan, dengan realisasi sebesar 61,5 persen dari target 52,5 persen.
 - b. Persentase realisasi penayangan Rencana Umum Pengadaan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, dengan realisasi sebesar 98 persen dari target 75 persen.
 - c. Capaian indeks kinerja pengadaan barang/jasa, dengan realisasi 41,9 (indeks) dari target 35 (indeks).
5. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
 - a. Sistem perencanaan PBJP terintegrasi.
 - b. Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
4. Terkait dengan adanya indikator Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang telah melebihi target agar berkoordinasi secara resmi melalui Nota Dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja tahun 2023.
5. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar

target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

- Memperbarui atau meng-*update* progres status pengadaan dan data kontrak pada menu pengadaan di aplikasi SiREMON.

2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) memiliki 6 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 8 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	07-Terpenuhinya integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya	01-Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat	300 LPSE	178 LPSE
		02-Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia. pelaksanaan kontrak. serah terima pekerjaan. dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya	80 Persen	63 Persen
		03-Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui non e-Purchasing	52,5 Persen	82,21 Persen
		04-Persentase nilai transaksi UMK dalam pengadaan melalui non e-Purchasing terhadap RUP	45 Persen	76,19 Persen
2.	08-Terpenuhinya standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik	01-Persentase pemenuhan standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik	35 Persen	Progres: 37,14%
3.	09-Terpenuhinya fungsi layanan pengadaan secara elektronik dan layanan dukungan pengguna yang berkualitas	01-Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem pengadaan secara elektronik	100 Persen	50 Persen

 Target telah tercapai

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	231-SPSE Terpusat	300 Layanan	178 Layanan
2.	234-Pedoman Tata Kelola LPSE	1 Pedoman	Progres: 50 Persen
3.	231-Penerima Layanan Dukungan Pengguna SPSE	10.400 Orang	10.029 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.2 pada bulan Juni 2023 adalah 52%.

3. Komponen

Tahun 2023, D2.2 memiliki 8 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Juni 2023 adalah 48,64%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D2.2 TA 2023 adalah sebesar Rp32.490.457.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	24.208.105.000	8.800.963.300	36.36 %	15.407.141.700
53 Belanja Modal	8.282.352.000	2.649.421.500	31.99 %	5.632.930.500
Total	32.490.457.000	11.450.384.800	35.24 %	21.040.072.200

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.2 di bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran D2.2 (parsial) sebesar Rp1.411.767.721. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp3.330.751.971 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp1.918.984.250 atau -57,61%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.2 adalah 89,12% yang ditayangkan. hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya ditayangkan.

3. Pada SK Terpenuhinya integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya terdapat beberapa kendala, diantaranya:
 - a. Indikator Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat:

Penarikan data dari 18 service SPSE Terpusat memakan waktu yang cukup lama. Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat didapat dari pengambilan data yang ada di lapangan saat ini sedang dilakukan penyesuaian sistem untuk dapat memfasilitasi penambahan LPSE pada LPSE yang menggunakan *service-service* SPSE Terpusat seperti aplikasi SPSE, SIKAP, Inaproc, Portal eproc, LSPE Support dan sistem pendukung lainnya.
 - b. Indikator Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya:

Terdapat Komunikasi yang belum efektif dengan Kementerian Keuangan untuk integrasi sistem pembayaran, jika melakukan inisiasi atau perubahan dalam pedoman integrasi antara sistem SPSE dengan SPBE K/L Lainnya.
 - c. Indikator Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui non e-Purchasing, Persentase nilai transaksi UMK dalam pengadaan melalui non e-Purchasing terhadap RUP:

Direktorat Sistem Pengadaan Digital tidak dapat memaksa untuk semua alokasi untuk dijadikan paket PDN karena kebutuhan dan realita di lapangan sangat dinamis.
4. Terdapat 2 paket pengadaan barang/jasa yang status nya sudah dibatalkan, yaitu:
 - a. Sewa internet data center IDC, anggaran dipindahkan untuk menutupi anggaran Colocation DCI.
 - b. Pengadaan Senior UI/UX Designer, tidak ada penyedia yang masuk dalam kategori spesifikasi yang diharapkan sehingga anggaran dialihkan untuk keperluan lain dan paket akan ditangani oleh tim PT Telkom.
5. Pada komponen Penguatan Kapasitas Infrastruktur dan Keamanan Informasi Pengadaan rekonfigurasi perangkat net-app terhambat karena adanya perubahan KAK dan terdapat penahanan anggaran pada pengadaan bimbingan teknis untuk Admin LPSE informasi terakhir.
6. Pada SK Terpenuhinya standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik dan RO Pedoman Tata Kelola LPSE, transisi Personel baru membutuhkan waktu untuk penyesuaian.
7. Pada Komponen Pengumpulan Data dan Informasi, terdapat format yang perlu dikoordinasikan untuk kebutuhan data pada internal terkait.
8. Pada komponen Konsultasi Publik, belanja jasa profesi sudah digunakan dan akan digunakan untuk kegiatan selanjutnya.

9. Pada Komponen Penyusunan Pedoman terdapat kendala adanya perubahan renstra, sehingga harus melaporkan ke pimpinan untuk konsep penyusunan pedoman.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan yang mendalam pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana. karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
5. Membuat strategi baru agar personil yang baru dapat segera menyesuaikan aktivitas standar tata kelola LPSE sesuai dengan target yang ditentukan dan dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Melakukan inisiasi untuk membuka komunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian target SK Terpenuhinya integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya.

2.9 DIREKTORAT SISTEM PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pasar Digital Pengadaan (D2.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	02-Meningkatnya kualitas e-purchasing yang mendorong produk dalam negeri dan partisipasi UMK	01-Persentase peningkatan peran serta UKM pada Katalog Elektronik	45 Persen	78,4 Persen
		02-Jumlah produk dalam negeri yang tayang dalam Katalog Elektronik	2.000.000 Produk	4.757.890 Produk
2.	04-Meningkatnya pemanfaatan sistem e-purchasing	01-Persentase penyelesaian paket pengadaan E-Purchasing	80 Persen	20 Persen
3.	05-Terpenuhinya integrasi katalog elektronik dan e-purchasing dengan sistem lainnya	01-Jumlah integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing dengan sistem lainnya.	5 Segmen	5 Segmen

 Target telah tercapai

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	221-Pedoman Sistem Katalog dan Toko Daring	2 Pedoman	Progres: 47%
2.	221-Produk yang Masuk <i>e-Catalogue</i>	2.000.000 Produk	4.757.890 Produk
3.	221-Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik	1 Laporan	Progres: 50%
4.	221-Sistem <i>e-Purchasing</i> Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 55%

 Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.3 pada bulan Juni 2023 adalah 50,48%.

3. Komponen

Tahun 2023 D2.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Juni 2023 adalah 45,27%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D2.3 TA 2023 adalah sebesar Rp18.644.440.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran (Rp)
51BelanjaPegawai	-	-	0%	-
52BelanjaBarang	11.456.103.000	2.257.100.240	19,70%	9.199.002.760
53BelanjaModal	7.188.337.000	77.837.800	1,08%	7.110.499.200
Total	18.644.440.000	2.334.938.040	12,52%	16.309.501.960

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023 realisasi penyerapan anggaran D2.3 (parsial) adalah sebesar Rp567.097.809, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp2.247.881.998 sehingga memiliki deviasi sebesar minus (-)Rp1.680.784.189 atau minus (-)74,77%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.3 yang telah ditayangkan adalah 100,20%, hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat beberapa catatan/permasalahan yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya yaitu:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan "Meningkatnya kualitas e-purchasing yang mendorong produk dalam negeri dan partisipasi UMK" terdapat kendala pada proses penarikan data pada *Dashboard* Monev Katalog yang seringkali terjadi perbedaan data dikarenakan sistem/server yang berat.
 - b. Indikator Sasaran Kegiatan "Persentase penyelesaian paket pengadaan e-purchasing" terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu,

mayoritas PP/PPK pada K/L/Pd belum menyelesaikan paket sampai dengan serah terima.

4. Pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan e-purchasing dengan sistem lainnya, terdapat permasalahan dalam proses integrasi dengan Kementerian Koperasi yang tidak jadi diimplementasikan sehingga segmen integrasi bulan Juni berkurang.
5. Pada indikator Rincian Output Sistem E-Purchasing Terintegrasi, sampai dengan bulan Juni 2023 masih terdapat kendala yang sama dalam proses pencapaian kinerjanya yaitu untuk penambahan kebutuhan data integrasi merek, perlu dilakukan penyelesaian proses administrasi PKS dengan Kemkumham.
6. Pada Indikator Sasaran Kegiatan dan Rincian Output Jumlah produk yang masuk e-catalogue, realisasi sampai dengan bulan Juni 2023 sudah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 4.757.890 produk dari target sebesar 2.000.000 produk.
7. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
 - a. Produk yang Masuk *e-Catalogue*; dan
 - b. Sistem *e-Purchasing* Terintegrasi

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan Komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. D2.3 harus membuat media informasi tentang tata cara penyelesaian paket pengadaan *e-purchasing* dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada para PPK di seluruh K/L/PD agar memahami penyelesaian paket sampai dengan serah terima.
4. Terkait dengan adanya permasalahan pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan e-purchasing dengan sistem lainnya, dalam hal

mempengaruhi target pada Renja agar D2.3 dapat berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada BPKeu.

5. Terkait dengan kendala pada indikator Rincian Output Sistem E-Purchasing Terintegrasi yang sampai dengan Juni 2023 masih terdapat kendala, direkomendasikan untuk dapat segera melakukan akselerasi penyelesaian proses administrasi PKS dengan Kemkumham, untuk selanjutnya dapat melanjutkan proses penambahan kebutuhan data integrasi merek.
6. Terkait dengan Indikator Sasaran Kegiatan dan Rincian Output Jumlah produk yang masuk e-catalogue yang realisasinya telah melebihi target agar menginformasikan dan berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja tahun 2023.
7. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.
8. Memperbarui atau meng-*update* progres status pengadaan pada menu pengadaan di aplikasi SiREMON.

2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	01-Jumlah SDM PBJ yang kompeten	4.575 Orang	Realisasi : 7.409 Orang
		02-Persentase pemenuhan regulasi standar kompetensi PBJ	80 Persen	34 Persen
2.	02-Terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan	01-Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3	290 UKPBJ	209 UKPBJ

 Target telah tercapai

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	311-Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 34 Persen
2.	311-SDM JF PPBJ	4.475 Orang	7.076 Orang
3.	312-Pedoman Pengembangan Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ	1 Pedoman	Progres: 30 Persen
4.	311-UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3)	290 Lembaga	209 Lembaga

 Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.1 pada bulan Juni 2023 adalah 38,5%.

3. Komponen

Tahun 2023, D3.1 memiliki 11 Komponen dari 4 Rincian Output dan rata-rata capaian komponen pada bulan Juni 2023 adalah 33,27%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D3.1 TA 2023 adalah sebesar Rp3.309.918.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	3.309.918.000	918.578.867	27.75%	2.391.339.133
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	3.309.918.000	918.578.867	27.75%	2.391.339.133

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran D3.1 (parsial) sebesar Rp650.331.753. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp74.507.415 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp575.824.338 atau 772,84%.

2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.2 adalah 84,38% yang ditayangkan. hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya ditayangkan.
3. Terdapat beberapa permasalahan, yaitu:
 - a. Pada komponen Penyusunan Instrumen, Formula perhitungan Kebutuhan JF PPBJ sedang menunggu masukan dan saran dari K/L Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota sehingga Keputusan Deputi tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ sedang dalam proses finalisasi.
 - b. Komponen Penilaian Angka Kredit, masih terbatasnya personil Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.
 - c. Beberapa kendala pada SK terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan:
 - (1) PIC pembuatan video terkendala dalam memberikan *feedback* karena adanya prioritas pekerjaan lain. Pembuatan Video Memasuki Bulan ke-4 dan ada potensi addendum masa kontrak.
 - (2) adanya *bugs* pada SIMKU sehingga mempengaruhi proses pembaharuan dokumen dan status kematangan pada *dashboard* masing-masing UKPBJ.
 - (3) Peserta bimtek sebagian batal hadir karena terkendala anggaran ataupun tidak mendapat izin atasan.
4. Terdapat 1 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3).

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan yang tepat waktu.
4. Berkoordinasi secara aktif dalam memonitor masukan dan saran dari K/L Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota agar Keputusan Deputi tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ dapat segera diselesaikan.
5. Berkoordinasi dengan BHOSDM guna mencari solusi terhadap terbatasnya personil Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.

6. Berkoordinasi dengan PPK D3.1 untuk memastikan kontrak pembuatan video telah di addendum.
7. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
8. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 6 indikator Rincian Output, dan 17 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	03-Terwujudnya kapasitas SDM dan mutu layanan sertifikasi PBJP	01-Tingkat keterandalan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	90 Persen	20,84 Persen

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	34 Lembaga	24 Lembaga
2.	331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	75 Orang	0 Orang
3.	331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ	5.450 Orang	3.787 Orang
4.	331-Pedoman Sertifikasi PBJP	1 Pedoman	Progres: 40 Persen
5.	332-Materi Uji Sertifikasi PBJP	20 NSPK	10 NSPK
6.	331-Sarana Sertifikasi PBJP	196 Unit	96 Unit

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.3 pada bulan Juni 2023 adalah 42.91%.

3. Komponen	
-------------	--

Tahun 2023. D3.3 memiliki 17 Komponen dari 6 Rincian Output dan rata-rata capaian komponen pada bulan Juni 2023 adalah 41.91%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D3.3 TA 2023 adalah sebesar Rp4.086.500.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	4.086.500.000	1.469.159.689	35.95%	2.617.340.311
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	4.086.500.000	1.469.159.689	35,95%	2.617.340.311

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran D3.3 (parsial) sebesar Rp 497.002.688. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 412.127.590 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 84.875.098 atau 20,59%
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D3.3 telah 100% ditayangkan.
3. Kurangnya SDM yang tersedia dalam tim disebabkan oleh mutasi beberapa pegawai. Sehingga dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu disebabkan oleh beban kerja yang tidak proporsional.
4. Penyebab mundurnya timeline proyek yang telah ditetapkan sebelumnya diakibatkan oleh kurangnya koordinasi yang tepat.
5. Pada RO Asesor yang belum mendapatkan pembinaan belum terdapat realisasi/progres karena kegiatan pembinaan asesor (RCC) sedang dalam proses persiapan.
6. Terdapat beberapa komponen yang masih pada tahap persiapan yaitu komponen perumusan strategi standarisasi, komponen penyusunan laporan dan rekomendasi dan komponen evaluasi/penilaian

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Melakukan monitoring terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. Berkoordinasi dengan BHOSDM guna mencari solusi terkait dengan keterbatasan SDM untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada.
5. Diskusi secara intensif bersama pimpinan untuk meminta arahan dan informasi yang jelas agar dapat menyelesaikan proyek tepat waktu.
6. Pada tingkat komponen tim segera mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan/aktivitas dengan konsep yang matang.
7. Agar segera melaporkan progres/capaian RO Asesor yang belum mendapatkan pembinaan dengan mempertimbangkan aktivitas/kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	01-Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat	01-Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan clearing house	40 K/L	35 K/L
2.	02-Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Pusat	01-Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	25 K/L	13 K/L

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	412-Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	20 K/L	10 K/L
2.	411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi	25 K/L	13 K/L

No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
	Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ		

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.1 pada bulan Juni 2023 adalah 51%.

3. Komponen

Tahun 2023, D4.1 memiliki 6 Komponen dari 2 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 50%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D4.1 TA 2023 adalah sebesar Rp1.150.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.150.000.000	451.158.705	39.23%	698.841.295
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.150.000.000	451.158.705	39.23%	698.841.295

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran D4.1 (parsial) sebesar Rp71.567.529,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp90.647.511,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp19.079.982 atau -21,05%.
2. Persentase Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah sebesar 99,69%, hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
2. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
4. PIC pelaporan agar meng-*update* atau menginformasikan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh unit organisasi dalam melaksanakan kegiatan pada aplikasi SiREMON.

2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023 Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 2 indikator sasaran kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	03-Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah	01-Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan <i>clearing house</i>	80 Pemda	71 Pemda
2.	05-Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Daerah	01-Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>	50 Pemda	27 Pemda

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	422-Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	80 Pemda	71 Pemda
2.	421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	50 Pemda	27 Pemda

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.2 pada bulan Juni 2023 adalah 71,38%.

3. Komponen

Tahun 2023, D4.2 memiliki 6 Komponen dari 2 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 51,67 %

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D4.2 TA 2023 adalah sebesar Rp1.810.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.810.000.000	516.080.905	28.51%	1.293.919.095
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.810.000.000	516.080.905	28.51%	1.293.919.095

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya pada indikator Sasaran Program Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri, masih terdapat Pemda yang hanya memenuhi indikator Clearing House ataupun Probitiy/Konsolidasi saja. Saat ini sedang dalam proses membentuk pemda yang memenuhi kedua indikator tersebut dalam rangka mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri.

2. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan clearing house dan Rincian Output Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House terdapat beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Masih kurangnya kesadaran pemangku kepentingan Pemda terkait pentingnya clearing house untuk diterapkan pada Pemda;
 - b. Masih terdapat keengganan dari Pemda untuk melaksanakan clearing house karena masih belum ada perhitungan angka kredit untuk Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan kegiatan clearing house;
 - c. Keterbatasan anggaran Pemda dalam melaksanakan kegiatan clearing house.
3. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya pada indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice terdapat beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Dalam penyusunan perencanaan pengadaan K/L/Pemda belum sepenuhnya mempertimbangkan konsolidasi pengadaan;
 - b. Pada tahap penyusunan anggaran Pemda belum mempertimbangkan adanya potensi paket-paket yang dapat dilakukan konsolidasi pengadaan;
 - c. Masih terdapat beberapa Pemda yang belum terbuka dalam pendampingan probity advice.
4. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya pada indikator Rincian Output Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ terdapat beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Terdapat keterbatasan produk PDN dan UMK;
 - b. Masih terdapat kenyamanan menggunakan produk non PDN dan anggapan produk non PDN lebih baik dari produk PDN;
5. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran D4.2 (parsial) sebesar Rp 147.771.916. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 181.166.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp33.394.084 atau -18,43%.
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 100% ditayangkan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Terhadap indikator Sasaran Program Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri:

- a. Perlu dibuat *funneling* yang dapat memberikan data dan/atau informasi perihal progres pemenuhan kriteria *Probity*/Konsolidasi di masing-masing K/L/Pemda;
 - b. Membuat skala prioritas K/L/Pemda dan menyusun strategi pemenuhan kriteria *Probity*/Konsolidasi;
 - c. Bilamana diperlukan dapat bermitra dengan beberapa kementerian/lembaga seperti KPK, Kemendagri, BPKP atau kementerian/lembaga lainnya untuk mendorong pelaksanaan konsolidasi atau *probity*.
3. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan clearing house dan an Rincian Output Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House:
- a. Melibatkan Pemda yang telah berhasil dalam melaksanakan clearing house (sebagai *success story*) agar menarik minat Pemda lainnya dalam turut serta melaksanakan clearing house;
 - b. Berkoordinasi dengan D3.1 agar pelaksanaan *clearing house* dapat dipertimbangkan dalam perhitungan angka kredit atau penilaian kinerja pada jabatan fungsional PBJ;
 - c. Mengoptimalkan anggaran, sumber daya, dan teknologi informasi yang ada di internal D42 guna membantu kebutuhan Pemda yang berpotensi melaksanakan clearing house.
4. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *probity advice*:
- a. Menyelenggarakan kegiatan seperti sosialisasi, workshop, dan sejenisnya agar meningkatkan pemahaman Pemda terhadap pentingnya konsolidasi PBJ;
 - b. Melibatkan K/L/Pemda yang telah berhasil dalam melaksanakan konsolidasi agar menarik minat K/L/Pemda lainnya yang berpotensi untuk melaksanakan konsolidasi;
 - c. Melibatkan pihak lain atau institusi lainnya dalam implementasi konsolidasi atau *probity advice* seperti KPK, Kemendagri, atau BPKP.
5. Terhadap indikator Rincian Output Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ adalah mendorong peningkatan jumlah dan kualitas produk PDN dan UMK kepada pemangku kepentingan seperti Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM, dan berkoordinasi dengan direktorat terkait di LKPP.
6. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.

7. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 14 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	04-Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	01-Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan layanan LPS	45 K/L/Pemda	Progres: 10 %
		02-Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan	40 APIP/K/L/Pemda	39 K/L/Pemda
		03-Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli	10 Provinsi	7 Provinsi
		04-Jumlah Perkara/Permasalahan PBJP yang terlayani	300 Perkara	248 Perkara

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	431-Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk	2 Orang	Progres : 15%
2.	432-Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk	45 Orang	Progres : 15%
3.	431-Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	300 Perkara	248 Perkara
4.	432-Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS	25 Perkara	7 Perkara
5.	431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	9 Lembaga	6 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.3 pada bulan Juni 2023 adalah 41,4%.

3. Komponen

Tahun 2023, D4.3 memiliki 14 Komponen dari 5 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 53%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D4.3 TA 2023 adalah sebesar Rp1.820.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	1.820.000.000	563.537.890	30.96%	1.256.462.110
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	1.820.000.000	563.537.890	30.96%	1.256.462.110

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023, realisasi anggaran D4.3 (parsial) sebesar Rp 137.256.227,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 228.098.538,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp90.842.311 atau -39,83%
2. Persentase Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah sebesar 103,52%, hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
3. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
4. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
5. PIC pelaporan agar meng-*update* atau menginformasikan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh unit organisasi dalam melaksanakan kegiatan pada aplikasi SiREMON.

2.15 INSPEKTORAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023 Inspektorat memiliki 9 indikator Sasaran Kegiatan, 1 indikator Rincian Output, dan 4 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
1.	01-Terwujudnya penguatan pengawasan organisasi	01-Indeks Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal	Predikat: Memuaskan	Realisasi : 3,45 Skor
		02-Survei Penilaian Integritas	Predikat: Memuaskan	Progres : 33 Persen
		03-Pendampingan Unit Organisasi LKPP dalam Pembangunan Zona Integritas	4 Unit Organisasi	5 Unit Organisasi
		04-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP	80 Persen	81,15 Persen
		05-Persentase Pelaporan Wajib Lapo LHKPN	100 Persen	100 Persen
		06-Persentase Pelaporan Wajib Lapo LHKASN	100 Persen	100 Persen
		07-Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Level 3	Level 3*
		08-Persentase Pemenuhan Unit Organisasi yang mendapatkan	90 Persen	100 Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
		kegiatan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT		
		09-Persentase Penanganan Pengaduan	100 Persen	100 Persen

*) Realisasi masih menggunakan tahun 2022 dikarenakan indikator tersebut masih berprogres

 Target telah tercapai

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
1.	965-Layanan Audit Internal	12 Dokumen	Progres: 50 Persen

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan Juni 2023 adalah 50%.

3. Komponen	
-------------	--

Tahun 2023. Inspektorat memiliki 4 Komponen dari 1 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 50%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Inspektorat TA 2023 adalah sebesar Rp850.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	850.000.000	357.033.531,00	42%	492.966.469,00
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	850.000.000	357.033.531,00	42%	492.966.469,00

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan Juni 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023. realisasi anggaran Inspektorat (parsial) sebesar Rp102.034.316. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp54.853.994 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 47.180.322 atau 86,01%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 100% ditayangkan.
3. Dari 9 indikator sasaran kegiatan terdapat 8 indikator yang telah tercapai dan 1 indikator masih dalam progres.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) memiliki 2 indikator sasaran kegiatan, 7 indikator Rincian Output, dan 19 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
1.	04-Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui pelatihan dan pembelajaran yang inovatif dan bermutu	01-Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	65 Persen	47,02 Persen
		02-Persentase peningkatan kualitas pelatihan	71 Persen	70,35 Persen

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni
1.	511-LPPBJ yang Terakreditasi	80 Lembaga	39 Lembaga
2.	511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	6 NSPK	1 NSPK
3.	512-Pedoman Pelatihan PBJ	3 Pedoman	Progres: 35 Persen
4.	511-Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	5 Paket	Progres: 30 Persen
5.	511-Peserta Pelatihan PBJ Teknis	1.491 Orang	7981 Orang
6.	512-Peserta Pelatihan PBJ Fungsional	805 Orang	1058 Orang
7.	512-Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJP	2 Laporan	Progres: 55 Persen

 Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Puslat PBJ pada bulan Juni 2023 adalah 50,96%.

3. Komponen

Tahun 2023, Puslat PBJ memiliki 19 Komponen dari 7 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 45,79%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Puslat SDM PBJ TA 2023 adalah sebesar Rp4.100.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	3.474.880.000	1.335.189.251	38.42 %	2.139.690.749
53 Belanja Modal	625.120.000	-	0%	625.120.000
Total	4.100.000.000	1.335.189.251	32.57 %	2.764.810.749

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdiklat di bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023 realisasi penyerapan anggaran Puslat SDM PBJ (parsial) adalah sebesar Rp918.900.720 realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp319.502.094 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp599.398.626 atau 187,60%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Puslat SDM PBJ telah 100% ditayangkan.
3. Terdapat beberapa catatan/permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya, yaitu:
 - a. Sampai dengan bulan Juni 2023 realisasi dan capaian pada Rincian Output Peserta Pelatihan PBJ Teknis dan Fungsional sudah melebihi target tahun 2023.
 - b. Terdapat permasalahan pada indikator Sasaran Kegiatan Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi uji yaitu kompetensi belum dilaksanakan sehingga belum dapat ditentukan kelulusan dari peserta penjenjangan dan okupasi.
4. Pada SK indikator Persentase peningkatan kualitas pelatihan, terdapat beberapa program yang masih belum diselesaikan.
5. Pada komponen Identifikasi Data dan Informasi, anggaran belum sepenuhnya cair.
6. Pada RO Peserta Pelatihan PBJ Fungsional, terdapat peserta Pelatihan Penjenjangan JF PPBJ Pertama dan Muda yang mengajukan perpanjangan proses OJT, sehingga diikutsertakan pada sesi OJT angkatan selanjutnya.
7. Pada komponen Penyusunan Laporan, beberapa LPPBJ terlambat dalam mengumpulkan laporan pelaksanaan pelatihan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI

A. Capaian Kinerja Fisik

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1	04-Meningkatnya layanan dan sistem informasi yang andal dan responsif	01-Persentase sistem informasi terintegrasi yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang proses bisnis internal LKPP	72,73 Persen	36 Persen

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Juni 2023
1.	963-Layanan Data dan Informasi	3 Layanan	3 Layanan
2.	963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1 Layanan	1 Layanan Progres: 14%
3.	963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	16 Unit	Progres: 13
4.	963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Sistem Informasi	Progres: 0%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusdatin pada bulan Juni 2023 adalah 19,25 %.

3. Komponen	
-------------	--

Tahun 2023, Pusdatin memiliki 9 Komponen dari 4 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 26,33 %.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Pusdatin TA 2023 adalah sebesar Rp7.604.260.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2023 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51BelanjaPegawai	-	-	0%	-
52BelanjaBarang	5.771.860.000	545.692.056	9,45%	5.226.167.944
53BelanjaModal	1.832.400.000	-	0%	1.832.400.000
Total	7.604.260.000	545.692.056	7,18%	7.058.567.944

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2023 realisasi penyerapan anggaran Pusdatin (parsial) adalah sebesar - Rp209.352.506 realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp591.319.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp800.671.506 atau -135,40%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) Puslat SDM PBJ adalah 96,56% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Pada indikator komponen Penyediaan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terdapat kendala adanya perangkat laptop pegawai yang menggunakan laptop sewa dengan performa agak lambat dan sering mengalami kendala seperti *bluescreen*. Kapasitas hardisk yang tersedia juga terbatas.
4. Pada komponen Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, banyaknya keluhan dari pegawai terkait akses fitur penandatanganan lampiran naskah yang lambat pada aplikasi e-office.
5. Pada RO Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terbatasnya limit Kartu Kredit Pemerintah untuk proses pengadaan lisensi software developer dan belum adanya konsultan untuk pengembangan sistem pendukung pengadaan barang/jasa.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi diharapkan:

- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan yang mendalam pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana. karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
 4. Melakukan koordinasi dengan PPK dan/atau vendor penyedia laptop sewa agar dapat memberikan solusi atas kendala yang dihadapi terkait dengan performa laptop.
 5. Segera ditelusuri penyebab kendala pada fitur tersebut untuk kemudian dapat diperbaiki atau mencari cara alternatif.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Juni 2023. dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada tahun 2023, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp200.222.132.000 dan sampai dengan bulan Juni 2023 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp73.390.445.683 (36,65%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	55.409.162.000	Rp27.153.669.457	49,01%	Rp28.255.492.543
52 Belanja Barang	120.204.065.000	Rp39.026.333.029	32,47%	Rp81.177.731.971
53 Belanja Modal	24.608.905.000	Rp7.210.443.197	29,30%	Rp17.398.461.803
Total	200.222.132.000	Rp73.390.445.683	36,65%	Rp126.831.686.317

2. Realisasi anggaran LKPP pada bulan Juni 2023 (parsial) sebesar Rp15.895.848.856, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan Juni 2023 sebesar Rp19.251.635.922 sehingga memiliki deviasi sebesar minus (-)Rp3.343.887.066 atau minus (-)17,37%.
3. Unit organisasi yang memiliki deviasi RPD masih dalam ambang batas ($\pm 5\%$) adalah Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU), sedangkan unit organisasi lainnya memiliki deviasi RPD di luar ambang batas ($\pm 5\%$).
4. Pada bulan Juni 2023, LKPP telah membuat kontrak/komitmen sebanyak 52 paket dengan total nilai kontrak yaitu sebesar Rp27.268.413.184 dimana terdapat 21 kontrak yang telah selesai dibayarkan sehingga masih terdapat 31 kontrak dengan nilai sisa sebesar Rp10.621.335.248.
5. Pada tahun 2023 pagu pengadaan LKPP sebesar Rp144.812.970.000 (72,33%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 26 Juni 2023, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp129.826.377.200 atau sebesar 89,65%. Masih terdapat Rp14.986.592.800 (10,35%) yang belum diumumkan melalui aplikasi SiRUP.
6. Nilai IKPA LKPP bulan Juni 2023 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 93,39.
7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan 13 Juni 2023 adalah sebesar 51,7 nilai tersebut termasuk kedalam kategori Kurang.
8. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:

- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
- b. Mencermati dan segera meng-update pengumuman RUP di SiRUP untuk unit organisasi yang penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaan;
- c. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Kegiatan, Rincian Output dan komponen);
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan
- e. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Juni 2023.

